

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu

Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Paccerakang Village, South Pongrang District, Luwu Regency

Olivia Cristy Steviani Toding, Natsir Tompo, Ade Ferry Afrisal

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: oliviatoroding30@gmail.com

Diterima: 10 Maret 2023 / Disetujui : 30 Juli 2023

Abstrak

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan Program Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun rumah yang layak huni. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu dan juga untuk mengetahui ketercapaian Program BSPS di Desa Paccerakang Kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil penelitian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Paccerakang belum sepenuhnya berhasil secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan yang tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. ini karna kurangnya kesadaran penerima untuk bergotong royong dalam membangun. selain itu, kurang tegasnya implementor dalam mendampingi. Jika implementor dapat bersikap tegas dalam mengawasi pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang akan sangat berpengaruh pada ketepatan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan pembangunan masih ditemukan penerima bantuan masih mengerjakan bangunan secara individual.

Kata Kunci: Implementasi, BSPS, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Paccerakang

Abstract

Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is an Assistance Program from the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) for low-income communities (MBR) to build houses that are livable. The type of research in this research is descriptive qualitative research. The purpose of this study is to determine the process of implementing BSPS in Paccerakang Village, South Pongrang District, Luwu Regency and also to determine the achievement of the BSPS Program in Paccerakang Village, Luwu. Based on the results of the research, the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) in Paccerakang Village has not been fully successful as a whole. This is due to the construction that was not completed in the allotted time. This is due to the recipient's lack of awareness to work together in building, still beneficiaries are still working on the building individually. In addition to the lack of importance of implementers in assist ing. If the implementation can be carried out firmly in supervising the BSPS in Paccerakang Village, it will greatly affect the timeliness given in completing the settlement.

Keywords: Implementation, BSPS, Low-Income Communities, Paccerakang



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang dimana belum mampu diselesaikan saat ini. Kemiskinan merupakan unsur yang akan menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Kemiskinan membuat orang tak bisa memenuhi kebutuhan pokok dirinya serta keluarganya yang meliputi keperluan mental, fisik, serta sosial. Jika keperluan pokok tidak terpenuhi, maka dapat berpengaruh pada terlantarnya kerabat serta akan

menjadi tunawisma. Adapun karakteristik utama dari kemiskinan adalah rendahnya dan terbatasnya dalam menangani kebutuhan baik pakaian, makanan, tempat tinggal dan pendidikan, dan juga kesehatan. Seperti yang dikemukakan (Maipita & Indra, 2013) kemiskinan merupakan tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok terdiri dari pangan, sandang, papan dan juga obat-obatan. Kemiskinan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan didalam negara, apabila semakin tinggi persentasi jumlah penduduk miskin yang terdapat disuatu negara maka semakin kecil pulah tingkat kesejahteraan di negara tersebut.

Implementasi kebijakan adalah suatu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi merupakan suatu kegiatan dalam sebuah rencana yang disusun secara matang dan terurai dengan tujuan untuk menangani masalah yang terjadi. Menurut Theresia (2014) implementasi adalah tahapan penting suatu program yang telah diterapkan dan harus dilaksanakan agar tercapai tujuan yang diinginkan serta dapat merasakan dampaknya. Implementasi kebijakan dapat dilakukan jika tujuan dari kebijakan telah ditetapkan, program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Adapun keberhasilan dari implementasi kebijakan Menurut Grindle dalam Subarsosno (2011) dipengaruhi oleh 2 faktor isi kebijakan dan lingkungan implementasi. unsur isi kebijakan yaitu sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program telah tepat, apakah sebuah kebijakan menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sementara itu, unsur lingkungan meliputi: kekuasaan, kepentingan dan implementor bersangkutan, karakter lembaga dan penguasa, ketaatan dan sikap daya tanggap.

Secara umum, kemiskinan disebabkan karena setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, adanya perbedaan kepemilikan aset yang mengarah pada munculnya distribusi yang timpang. Dimana masalah ini dilihat dari sebagian besar masyarakat pemilik SDA terbatas, selain itu dipengaruhi oleh SDM ditingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan kegagalan untuk membina diri mereka sendiri dan juga mempengaruhi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang tinggi. Tingginya angka pengangguran di suatu negara akan menimbulkan kemelaratan serta masalah ekonomi dan politik negara yang kurang mendorong perekonomian rakyat. Proses ini berjalan secara merata dan terhubung satu sama lain, yang akhirnya akan terfokus pada pelemahan masyarakat miskin. Jika masalah ini tidak segera ditangani, akan memperburuk keadaan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu dengan mencanangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diatur di dalam (PERMENPUPR, n.d.)PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

BSPS atau di sebut juga dengan “Bedah Rumah” merupakan program yang dimana diusung oleh Kementerian PUPR. BSPS merupakan bantuan pemerintah dimana diasosiasikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk melakukan pembangunan rumah layak huni. MBR adalah masyarakat dimana memiliki daya beli terbatas sehingga harus mendapatkan bantuan pemerintah agar mendapatkan hunian yang layak. Menurut UU No 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinyatakan bahwa Kawasan perumahan dan permukiman adalah suatu struktur terpadu yang mencakup pembinaan, pelaksanaan penginapan, pelaksanaan kawasan permukiman, dukungan dan perbaikan, penangkalan dan peningkatan kualitas penginapan kumuh dan permukiman kumuh, pemberian dana dan pembiayaan dan juga peran masyarakat. Penyelenggaraan

kawasan permukiman dilaksanakan agar dapat melengkapi hak rakyat untuk mendapatkan hunian layak didalam lingkungan sehat, serasi, aman, serta teratur. Selanjutnya Undang-Undang No.1 Tahun 2011, menjelaskan bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya agar mampu memiliki tempat tinggal layakahuni dan terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat,aharmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Hikmawaty *et al.*, (2016) bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi bagi setiap orang, jika kebutuhan rumah tidak terpenuhi akan menyebabkan pada keterlantaran anggota keluarga dan menyebabkan tunawisma. Kehadiran rumah memegang peranan penting bagi keberadaan manusia, baik secara terpisah maupun dalam keluarga yang terdiri dari segi fisik, mental dan sosial. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dari panasnya sinar matahari dan hujan, risiko penyakit, dan serangan makhluk hidup. Rumah sebagai tempat perlindungan harus memenuhi kebutuhan aktual, khususnya kokoh, terlindungi dan sehat, secara intelektual untuk memuaskan rasa kenyamanan dan martabat, dan menjaga keamanan setiap kerabat. Sementara itu, dalam pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan serta kebijakan yang diterapkan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan sehingga dapat menjawab masalah kebutuhan perumahan yang layak agar tepat sasaran. Di kabupaten luwu sendiri khususnya di Desa Paccerakang kecamatan pondrang selatan telah melaksanakan Program BSPS. BSPS ini merupakan bentuk kebijakan dariapemerintah melalui Dinas PUPR dalam upaya meringankan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memilikiarumah tapiatergolong dalam rumahatidak layak huni (RTLH). Program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Paccerakang mulai berjalan sejak tahun 2019. Bentuk Bantuan StimulanaPerumahan Swadayaaberupa uangandan barang.

Desa Paccerakang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Namun hasil yang mereka dapat tidak cukup untuk memenuhi dari banyaknya kebutuhan mereka terlebih mengharapkan rumah yang layak huni. Selain itu sebagian masyarakat masih ada yang belum memiliki rumah atau rumah mereka tidak masuk dalam kriteria layak. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut. Dengan adanya program unggulan dari pemerintah terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masyarakat yang berada di Desa Paccerakang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses dan pencapaian dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pondrang Selatan Kabupaten Luwu.

Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang Kecamatan Pondrang Selatan Kabupaten Luwu dan juga untuk mengetahui ketercapain Program BSPS di Desa Paccerakang Kabupaten Luwu.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan informasi yang jelas sebagai kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga data yang dikumpulkan berupa kata dan gambar (bukan angka). Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dari fenomena yang sedang diteliti untuk memudahkan peneliti memperoleh informasi yang objektif untuk mengetahui dan memahami Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa

Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini yaitu:

- (1) data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti dengan turun langsung ke objek dalam hal ini melakukan wawancara dan observasi,
- (2) data sekunder, adalah data pelengkap yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, serta laporan dari mana saja yang sifatnya relevan yang berhubungan dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu. Keberadaan dokumen sekunder ini adalah untuk menjadi landasan yang nantinya menguatkan kerangka pemikiran terkait hasil penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah (1) Wawancara Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan sumber yang dianggap tahu banyak tentang objek dan masalah penelitian. Dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapat informasi terkait dengan masalah yang akan diteliti. Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu terdiri atas dua yang pertama, wawancara terstruktur, Kedua, wawancara bebas yang mendalam terkait fenomena yang akan diteliti melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur (2) Observasi Observasi yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek dari penelitian dan mencatat secara sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian dengan maksud untuk mendapat data terkait implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu. (3) Dokumentasi Dokumentasi dapat dilakukan dengan mencari informasi melalui sumber yang berbeda, misalnya catatan, jurnal, buku, transkrip dll. Untuk situasi ini, peneliti mengumpulkan informasi sebagai arsip sehubungan dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang, Kecamatan Pongrang Selatan, Kabupaten Luwu.

Teknik analisis data dalam penelitian ini Menurut (Sugiyono, 2010) terdapat tiga model dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. (1) Reduksi data berarti merangkun, memilih hal-hal yang signifikan, memusatkan pada hal-hal yang signifikan. (2) Penyajian data berupa penggambaran singkat, diagram, hubungan antar kategori dan semacamnya. Yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif (Sugiyono, 2017). Untuk situasi ini peneliti akan memperkenalkan informasi dalam bentuk teks, untuk menjelaskan hasil penelitian agar dapat membantu dengan memanfaatkan tabel atau gambar. (3) Verifikasi Data Menurut (Sugiyono, 2007) kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rencana masalah yang telah terbentuk, namun mungkin juga tidak, dengan alasan seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berperan dalam menjaga keselarasan hidupnya. Dimana hak memiliki tempat tinggal merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Layak yang dimaksud yaitu jaminan keamanan dan hukum, mudah diperoleh dari penghasilan, dukungan untuk pelaksanaan latihan kehidupan sehari-hari, atau hal-hal lain yang membuat keberadaan penduduk bermartabat sebagai manusia. Selain itu, pengertian lain rumah layak huni adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali, terlindung dari sinar matahari, hujan dan kotoran. Tapi terbatasnya dana, belum tentu semua masyarakat, terutama MBR dapat membangun rumah

yang layak. Program BSPS adalah program dari Menteri PUPR untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki tempat tinggal yang layak, sehat serta aman.

Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok sebagai rumah yang layak, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Menurut (Hikmawaty et al., 2016) Rumah yang layak merupakan rumah yang kokoh atau sering disebut layak, yang keberadaannya harus diupayakan, kebutuhan rumah yang layak diharapkan sebagai usaha untuk mewujudkan kekuatan keluarga, apabila Tidak terpenuhi akan menimbulkan beberapa masalah, seperti pengabaian atau masalah bantuan sosial pemerintah keluarga.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program yang lahir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan BSPS merupakan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah yang baru.

Tujuan BSPS yaitu untuk memberdayakan MBR sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang layak dilingkungan yang aman dan nyaman dan membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, BSPS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia khususnya rumah sebagai tempat tinggal, melalui pengembangan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah dan perbaikan rumah yang tidak layak, sehingga keluarga yang kurang mampu dapat memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera.

Ada beberapa tujuan lain dari program bantuan stimulan perumahan swadaya yang ingin dicapai dari pelaksanaan program ini, yaitu:

1. Mempercepat peningkatan pengentasan kemiskinan melalui upaya peningkatan swadaya, prakarsa partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas penduduk kurang mampu.
3. peningkatan nilai budaya gotong royong dan kesawadayan.
4. Dapat memenuhi kebutuhan rumah yang layak, sehat untuk masyarakat kurang mampu.
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui tata cara berperilaku hidup bersih dan sehat.

Kabupaten Luwu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara 2°34'45''- 3°30'30'' Lintang Selatan dan 120°21'15'' - 121°43'11'' Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu terletak pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar. Kabupaten Luwu terletak diantara Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan kota Wajo di sebelah selatan, Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat, yang dilihat berdasarkan posisi geografisnya. Daerah Kabupaten Luwu terbagi menjadi dua wilayah yang disebabkan karena adanya pemekaran dari Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan dan bagian utara dari Kota Palopo

1. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrango Selatan Kabupaten Luwu

Menurut Leo Agustino dalam (Winarno & Budi, 2008) implementasi adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut. Adapun teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Agostiono (2010) yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor.

a) Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menjelaskan standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak tepat dan sesuai, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para pelaksana implementasi. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Sementara itu kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan tersebut antara lain adalah keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Ady Sumpratman selaku Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS:

“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya lebih mengutamakan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas bangunan terutama atap, lantai, dan dinding”(wawancara 12 Juli 2022).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Tenaga Fasilitator Lapangan mengatakan bahwa:

“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebenarnya bukan bantuan yang pokok, yang pokok sendiri yaitu uangnya penerima sendiri (Swadaya penerima bantuan). Bantuan ini hanya untuk menggenapkan/mencukupkan uang penerima bantuan. Jadi bantuan ini lebih mengutamakan masyarakat yang memiliki swadaya. Jika ada masyarakat yang tidak memiliki rumah tidak layak huni tapi tidak memiliki swadaya itu bukan dalam kategori, karena syarat penerima BSPS harus siap berswadaya. Karena setelah pembentukan kelompok harus ada tanggung renteng, dan kemudian siap berorganisasi dan siap berswadaya” (Ibu Sri Sulasmi, wawancara 12 Juli 2022).

Maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk proses pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Kementerian PUPR. Adapun untuk bantuan BSPS di Desa Paccerakang sudah tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Proses pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang dimulai dari mengusulkan nama-nama calon penerima yang memang masyarakat berpenghasilan rendah, yang akan diverifikasi oleh PUPR kemudian akan diverifikasi ulang oleh TFL untuk mengolah data para calon penerima BSPS kemudian akan dibuatkan SK calon penerima bantuan.

b) Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn menjelaskan implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

berdasarkan keterangan Ibu Nur Reski mengenai perekrutan TFL mengatakan bahwa:

“Yang memilih pendamping itu kan ada proses perekrutan dari Balai Pelaksana Perumahan. Yang memilih pendamping itu langsung dibuka perekrutannya dari Balai Pelaksana Perumahan Sulawesi tiga, itu yang membuka perekrutan untuk merekrut fasilitator. Mereka yang menetapkan, mengesahkan. Ini kan anggarannya dari APBN bukan APBD kan” (Wawancara tanggal 13-07-2022)

Pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang berdasarkan penelitian, TFL telah mendampingi penerima bantuan, tidak ada kendala bahan bangunan maupun dana dalam pelaksanaan BSPS.

“Batunya saja tidak cukup 1 biji koordinasi dengan kami, karena itu tugas kami bagaiman barangnya bisa sampai kepenerimanya, makanya saat pengantaran barang memang harus dihitung karena jika ada yang kurang kami bisa koordinasikan ke toko bangunan” (Bapak Ady, wawancara 12 Juli 2022).

Dari hasil penelitian. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini. Dan untuk sumber daya finansial (anggaran dana) sendiri, tidak ditemukan permasalahan kekurangan dana ataupun bahan bangunan. Semua sudah sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

c) Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antara fasilitator dan Dinas PERKIM dalam pelaksanaan BSPS dimulai melalui pada penyeleksian calon penerima bantuan. Kepala Desa memberikan usulan nama-nama calon penerima yang tidak layak huni di Desa Paccerakang ke Dinas PERKIM, kemudian Dinas PERKIM akan menverifikasi data nama calon penerima yang akan diusulkan ke kementerian PUPR. Di Dinas PUPR akan menyeleksi kembali calon nama penerima bantuan. Setelah PUPR menentukan calon penerima, selanjutnya berkoordinasi dengan TFL untuk menverifikasikan kembali nama-nama yang telah ditentukan oleh PUPR, kemudian akan di kirim ke Balai penyedia perumahan yang ada di provinsi untuk dibuatkan SK. Setelah SK keluar TFL dan Kepala Desa mengumpulkan calon penerima bantuan untuk melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Resky:

“Itu pengusulannya pertama memang dari desa mengusulkan ke Dinas, kami megusulkan ke pusat. Kan penentuan alokasinya nanti pusat yang tentukan, semua dari kementrian PUPR” (Ibu Nur Reski selaku staf Dinas PERKIM, wawancara 13 Juli 2022).

Ini juga dibenarkan oleh Ibu Izzah:

“Untuk hubungan implementor dan penerima bantuan bagus ji, itu hari kami dikumpulkan oleh Kepala Desa dan tim pendamping untuk sosialisasi bantuan ini” (wawancara 13 Juli 2022).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk hubungan antara implementor dan penerima bantuan terjalin dengan baik, dimulai pada saat penentuan calon penerima sampai dengan pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan rumah layak huni di Desa Paccerakang, pedoman kerja bagi para implementor dalam pelaksanaan BSPS adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Adapun instansi yang terlibat dan berperan dalam proses pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Kementerian PUPR, Bank penyalur, pemerintah daerah (kabupaten/kota dan desa) yang mengusulkan penerima bantuan stimulan, tenaga fasilitator lapangan (TFL), Dinas PERKIM dan juga pihak yang ditunjuk untuk bahan bangunan.

“Kalau pengusulan calon penerima bantuan itu dari kepala desa, kepala desa koordinasi dengan Dinas PERKIM untuk mengusulkan nama calon penerima ke pusat. Setelah penetapan calon penerima oleh pusat, kami tim fasilitator akan membawa nama-nama calon penerima ini untuk mendampingi mereka dalam pembangunan rumah hingga selesai” (Ibu Sri, wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa untuk komunikasi antara agen pelaksanaan dan penerima bantuan sudah terjalin baik dan terbuka. Ini dilihat pada saat

penyaluran bantuan TFL dan pemerintah desa telah mendampingi selama proses pembangunan hingga selesainya pembangunan.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan untuk implementasi kebijakan, karakteristik partisipan apakah mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Lingkungan ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan untuk mengetahui kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Faktor penghambat tidak terselesainya pembangunan karena faktor keadaan alam. Seperti yang diutarakan oleh Bapak ady:

“Biasanya terlambat itu faktor keadaan alam, cuaca, paling banyak faktor kemalasan” (Bwawancara 13 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan rumah. Mereka yang telah mendapat bantuan tidak benar-benar serius untuk melakukan pembangunan, ini karena faktor kemalasan masyarakat. Selain itu adapun faktor pengambat pembangunan juga dipengaruhi faktor keadaan alam.

f) Disposisi Implementor

Sikap Implementor dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dalam implemementasi kebijakan Para aparat pemerintah, mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Tenaga Pengelola, Fasilitator dan juga masyarakat sendiri sebagai kelompok sasaran adalah mereka yang secara langsung berperan bagi berhasil tidaknya kebijakan.

Dalam pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang sikap para implementor dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Ini karena jika para implementor BSPS dijalankan dengan baik, maka akan ditanggapi baik juga oleh penerima bantuan. Adapun BSPS yang saat ini berjalan di Desa Paccerakang yaitu BSPS yaitu bantuan yang menggunakan dana dari APBN. Jadi penentuan kuota penerima bantuan berdasarkan dari pemerintah pusat dan tentunya terbatas. Untuk sikap para implementor dalam pelaksanaan BSPS tidak ditemukan permasalahan, tidak ada keluhan dari penerima calon bantuan maupun implementor sendiri. Hubungan antara Implementor dan penerima bantuan berjalan dengan baik dan tentunya bantuan BSPS di Desa Paccerakang sangat membantu masyarakat untuk dapat memiliki rumah yang layak huni dari sebelumnya.

2. Ketercapaian Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu

Menurut George C. Edward III (1980:1), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Pada pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang ditemukan miskomunikasi pelaksanaan kebijakan BSPS. Pada tahun 2019 pelaksanaan BSPS tidak berjalan lancar. Ini disebabkan karena pada saat Pemerintah Desa mensosialisasikan tentang BSPS kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Paccerakang masyarakat beranggapan bahwa mereka yang dikumpulkan untuk mengikuti sosialisasi BSPS adalah mereka yang akan menerima

bantuan BSPS. Padahal dalam kenyataannya masyarakat dikumpulkan untuk menegetahui yang layak mendapat bantuan adalah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Menteri PUPR. Pada tahun 2019 kemarin proses implementasi BSPS dimulai dari mensosialisasikan terlebih dahulu bantuan BSPS kemudian akan menverifikasi nama-nama calon penerima bantuan.

“Tahun 2015-2020 kemarin itu pelaksanaan BSPS kami mulai dengan sosialisasi kemudian melakukan verifikasi, ternyata disaat verifikasi kami selesaikan banyak orang merasa kecewa karna dia hadir sosialisas, ketika dia hadir sosialisasi dia beranggapan bahwa kita ini sudah dapat bantuan padahal ternyata tidak. Jadi kita rubah mindsetnya” (Bapak Ady, wawancara 12 Juli 2022).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh penerima bantuan BSPS 2019 Ibu leni:

“Tahun 2019 kemarin penerima BSPS memang dikumpulkan pemerintah untuk sosialisasi dulu” (Wawancara 12 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa implementasi BSPS di Desa Paccerakang belum maksimal. Sehingga pemerintah mengubah mindset pelaksanaan BSPS lagi. Dimana bantuan BSPS dimulai dari menverifikasi nama-nama calon penerima bantuan, setelah diverifikasi kemudian akan mensosialisasikan Program BSPS kepada masyarakat yang akan menerima bantuan.

“Tahun 2021-2022 saat ini proses pelaksanaan BSPS sudah berubah. Sekarang yang kami sosialisasikan itu yang berdasarkan nama-nama yang ada di situ. Jadi jangan sampai kami panggil lagi untuk sosialisasi tapi tidak sesuai dengan hasil verifikasi” (Bapak Ady, Wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara di atas ternyata masih ditemukan masyarakat yang belum paham betul terkait bantuan BSPS ini. Masih ada masyarakat beranggapan jika bantuan ini adalah bantuan untuk orang miskin. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk mensosialisasikan atau memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang program bantuan ini agar tidak ada kecemburuan sosial masyarakat kepada penerima bantuan.

b) Sumber Daya

Keberhasilan suatu program sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan program. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan BSPS di Desa paccerakang belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Ini disebabkan karena ada sebagian tenaga kerja untuk membangun rumah tidak memiliki perencanaan yang baik. Ini dilihat dari keterlambatan dalam membangun rumah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada saat pembangunan rumah kurangnya peran sumber daya manusia dalam hal ini adalah penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan.

“Pembangunan rumah kami melewati batas dari waktu yang telah ditentukan, ada juga beberapa rumah lainnya yang masih dalam pekerjaan” (Bapak Natan, 10 Agustus 2022).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang digunakan. Apabila sumber daya manusia yang digunakan tidak memiliki keahlian dan keterampilan serta kerja sama yang baik dalam pelaksanaan pembangunan maka program yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan.

c) Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan program BSPS yaitu apakah program sudah pada sasarannya dan dalam menentukan keluarga sasaran apakah sudah tepat pada keluarga sasaran. Untuk pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang terlihat sudah tepat sasaran. Ini dibuktikan berdasarkan:

“Untuk penerima bantuan BSPS diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan siap untuk berswadaya. Semua yang mendapatkan bantuan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kita punya data-data penduduk jadi ini bisa membuktikan jika penerima bantuan memang layak diberikan dan telah tepat sasaran.”(Bapak Galaluddin, Wawancara 12 jukli 2022).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan BSPS:

“Saya lihat masyarakat penerima BSPS sudah tepat sasaran, semua penerima bantuan ini memang layak diberikan”.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga wawancara peneliti dengan informan, untuk pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang sudah dilakukan secara jujur. Ini juga dibuktikan para implementor juga telah melakukan tugasnya dalam mendampingi pembangunan BSPS di Desa Paccerakang. Selama peneliti melakukan penelitian, penerima bantuan BSPS tidak mengeluhkan akan persoalan dana yang kurang serta tidak ada komplain dari penerima bantuan kepada para implementor. Penerima bantuan sudah sesuai dengan ukuran atau indikator kemiskinan yang telah ditentukan, lepas dari segala kepentingan, sehingga program ini sudah tepat sasaran.

d) Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi mencakup hal-hal yang sangat penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Program BSPS adalah mekanisme pelaksanaan, dalam hal ini bagaimana kerangka kerja yang dipakai.

Dalam proses pelaksanaan BSPS, belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Ini dilihat dari ada berapa dalam pembangunan rumah ditemukan kurangnya kerjasama kelompok dalam membangun rumah seperti yang dijelaskan dalam mekanisme pengelolaan bantuan BSPS yaitu kelompok penerima bantuan siap bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan secara gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan. Dari hasil analisis di atas membuktikan betapa Pentingnya struktur birokrasi dalam mekanisme pelaksanaan program bedah rumah yang dilaksanakan, tentunya menunjang agar program dapat berjalan dengan lancar dan program ini bisa terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pondrang Selatan Kabupaten Luwu ini belum sepenuhnya berhasil secara keseluruhan. Ini ditandai dari pada saat pelaksanaan pembangunan, masih ada beberapa rumah yang tidak terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. ini karena kemalasan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki keseriusan dan kerjasama yang baik dalam pembangunan sehingga pembangunan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Selain itu ini dilihat juga dari kurang tegasnya implementor dalam mendampingi penerima bantuan, jika para implementor dapat mendampingi secara tegas dan memberi tindakan yang tegas jika menemukan ada pembangunan yang tidak dikerjakan atau tidak memiliki tukang dalam pengerjaan rumah pasti pembangunan rumah akan terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.

Untuk ketercapaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Paccerakang sendiri sudah tepat sasaran. Ini ditandai berdasarkan hasil penelitian dimana penerima bantuan BSPS di Desa Paccerakan adalah Masyarakat Yang Bepernghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah layak huni dan telah siap untuk bersawdaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Tjilen. (2019). Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik, Bandung. Hikam Media Utama.
- Abdulla, S. (2007). perkembangan studi implementasi.
- Hikmawaty, Eny, & Gutomo, T. (2016). Implementasi program bedah rumah sebagai upaya penanganan permukiman kumuh di kota malang (studi di dinas perumahan dan pemukiman kota malang).
- Maipita, & Indra. (2013). Memahami dan Mengukur Kemiskinan. Absolute Media.
- Sugiyono. (2007). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.
- Sugiyono. (2010). metode penelitian pendidikan kualitatif, kuantitatif, dan R&D.
- Winarno, & Budi. (2008). Kebijakan publik.